



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP 2022)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jl. Soekarno Hatta No. 37 Bangkalan



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia, taufik, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Kami dapat menyusun “ **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022** ” dengan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/3003 tentang Perbaikan pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan maksud untuk memberikan informasi secara garis besar, sederhana dan ringkas mengenai visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik di Bangkalan

Semoga dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, dapat memberikan pedoman dan sebagai bahan evaluasi untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan bimbingan dan petunjuk yang benar sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian masing-masing demi kemajuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Bangkalan, Januari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN**

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. DASAR HUKUM	5
D. GAMBARAN UMUM SKPD	6
E. ORGANISASI	7
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. PERENCANAAN KINERJA	11
1. VISI	11
2. MISI.....	12
3. TUJUAN.....	13
4. SASARAN.....	13
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	14
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA	16
B. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN.....	17
BAB IV PENUTUP	18

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Rencana Strategis
- 2. Rancana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
- 3. Penetapan Kinerja 2022
- 4. Pengukuran Kinerja
- 5. IKU (Indikator Kinerja Utama)
- 6. Program dan Kegiatan Tahun 2022

TABEL	NOMOR
TABEL 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Ruang Pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bangkalan	6
TABEL 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.....	7
TABEL 3 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan	7

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 merupakan laporan capaian kinerja (*performance*) selama tahun 2022 yang mengacu pada perencanaan strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan.

Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan telah dijabarkan dalam rencana kinerja (Renja) tahun 2022 sebagaimana komitmen untuk pelaksanaan kinerja tahun 2022. Sesuai dengan rencana kinerja tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik cara untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui 6 Program, 7 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.

Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian sasaran tersebut sumber anggaran yang digunakan sebesar Rp. 10.816.140.394,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.432.218.695,- seluruhnya berasal dari dana APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 96% dengan kategori **Sangat berhasil**.

Dari capaian kinerja dengan katagori sangat berhasil tersebut cara pencapaiannya untuk tahun 2022 disamping melalui 6 program, 7 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan, juga melalui pembagian tugas kepada masing – masing Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

Lampiran

RENCANA STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2018-2023

TUJUAN			SASARAN			CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kasus sara/politik/bela negara yang terselesaikan	100%	Meningkatnya masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat / pemuda yg sadar akan wawasan kebangsaan	100%	Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan wawasan kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
			Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kerjasama	Persentase pemahaman masyarakat terhadap	100%	Meningkatkan pelaksanaan pembinaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	

			pemerintah, Ormas, LSM dan Parpol	kerjasama pemerintah, ormas, LSM dan Parpol			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Penyelenggaraan, koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	Persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dlm masyarakat	100%	Meningkatkan FKDM dan koordinasi dengan instansi terkait	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022**

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			KET
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat / pemuda yg sadar akan wawasan kebangsaan	100%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	
		100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN		Persen	100	

			EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA				
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kerjasama pemerintah, Ormas, LSM dan Parpol	Persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah, ormas, LSM dan Parpol	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persen	100	
		100%	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Jumlah perumusan kebijakan yang tersusun		100	

			ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
Penyelenggaraan, koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	Persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dlm masyarakat	100%	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persen	100	
		100%	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persen	100	

**PROGRAM KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022**

NAMA PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan PDA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisat Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	<i>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2022**

KEGIATAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET/PAGU	REALISASI	PENCAPAIAN/TINGKAT CAPAIAN %	KET
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI				
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4.953.000	4.952.900	100,0	
Koordinasi dan Penyusunan PDA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	3.020.000	3.019.950	100,0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.660.000	2.659.900	100,0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.750.000	2.703.700	98,3	
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.680.982.087	3.596.375.161	97,7	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3.200.000	3.200.000	100,0	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	3.342.500	3.342.500	100,0	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia				
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.298.500	15.097.050	98,7	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia				
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.441.800	5.227.300	96,1	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.607.650	52.487.450	97,9	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.081.000	26.434.750	94,1	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.621.407	46.277.850	99,3	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.128.000	6.600.000	92,6	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.797.000	73.631.600	99,8	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.584.700	48.473.700	99,8	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.745.000	4.730.000	82,3	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.220.000	28.890.184	82,0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.202.903.150	2.177.603.872	98,9	
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.530.000	104.899.286	91,6	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	6.299.450	6.210.000	98,6	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	33.190.000	31.611.500	95,2	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>				
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	1.514.800	1.514.800	100,0	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	799.300	799.300	100,0	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion dan penerima manfaat dana hibah	-			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	3.588.550	3.441.550	95,9	

Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	1.494.300	1.494.300	100,0	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>				
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	199.092.500	187.455.300	94,2	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	3.059.906.000	2.836.329.300	92,7	

Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol					
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>				
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yg tersusun				
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	14.049.650	13.639.650	97,1	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion	26.089.350	26.089.350	100,0	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	155.550.300	155.550.300	100,0	

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	1.249.300	1.249.300	100,0	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	2.526.100	2.151.050	85,2	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSentase KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI				
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah aparaturnya yang mengikuti rapat rencana aksi	15.000.000	14.720.000	98,1	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda	957.925.000	943.355.842	98,5	

**PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI		
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100%	4.953.000
		Koordinasi dan Penyusunan PDA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	100%	3.020.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2.660.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.750.000
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia</i>		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.680.982.087
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	100%	3.200.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	100%	3.342.500

		Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%	15.298.500
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia		
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	5.441.800
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	53.607.650
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	28.081.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	46.621.407
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	7.128.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	73.797.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	48.584.700
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		

			Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	5.745.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	35.220.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	2.202.903.150
		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	114.530.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100%	6.299.450
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100%	33.190.000
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	100%	1.514.800

		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	100%	799.300
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion dan penerima manfaat dana hibah		-
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%	3.588.550
		Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%	1.494.300
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>		
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	100%	199.092.500

4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	100%	3.059.906.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>		
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yg tersusun		
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	100%	14.049.650
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion	100%	26.089.350

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%	155.550.300
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%	1.249.300
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%	2.526.100
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		PERSENTASE KETERCAPIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI		
		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	100%	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah aparaturnya yang mengikuti rapat rencana aksi	100%	15.000.000

		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda	100%	957.925.000
--	--	--	--	------	-------------

**PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan			
Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan			
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	4.952.900	1 dok
Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	3.019.950	4 dok
Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	2.659.900	4 dok
Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	2.703.700	4 lap
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%		
Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	3.596.375.161	42 ASN
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	3.200.000	4 dok
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	3.342.500	18 dok

Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%		
Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	15.097.050	6 lap
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%		
Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%		
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%		
Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	5.227.300	10 jenis
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	52.487.450	3 jenis
Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	26.434.750	2 jenis
Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	46.277.850	2 jenis
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	6.600.000	5 jenis
Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	73.631.600	50 kali
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%		

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	48.473.700	1 unit
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%		
Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	4.730.000	2 jenis
Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	28.890.184	3 jenis
Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	2.177.603.872	6 jenis
Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%		
Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	104.899.286	17 unit
Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	6.210.000	1 unit
Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	31.611.500	40 unit
PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%		
Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%		

Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	1.514.800	1 dok
Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	799.300	1 dok
Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion dan penerima manfaat dana hibah	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%		
Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	3.441.550	5 orang
Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	1.494.300	1 dok
PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	100%		
<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	100%		
Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	100%	187.455.300	1 kegiatan
PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	100%		

1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	100%	2.836.329.300	5 dok
Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%		
Jumlah dokumen penyusunan program kerja yg tersusun	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%		
Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	13.639.650	2 dok
Jumlah masyarakat / aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	26.089.350	2 dok
Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	155.550.300	200 orang
Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	1.249.300	1 dok
Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	2.151.050	1 dok
PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	100%		
Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	100%		

Jumlah aparatur yang mengikuti rapat rencana aksi	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	100%	14.720.000	40 orang
Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	100%	943.355.842	23 orang

**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLISI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI				
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100%		9.311.800	4.952.900
Koordinasi dan Penyusunan PDA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	100%		1.894.900	3.019.950
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisat Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisat Realisasi Kinerja SKPD	100%		1.895.000	2.659.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		1.895.000	2.703.700
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	100%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		3.392.976.000	3.596.375.161
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	100%		2.299.150	3.200.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	100%		3.830.000	3.342.500
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	100%			

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%		15.719.900	15.097.050
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	100%			
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%		67.924.950	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100%			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%		8.531.000	5.227.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		48.681.000	52.487.450
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%		30.835.000	26.434.750
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%		38.318.700	46.277.850
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%		6.600.000	6.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		44.982.445	73.631.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%		160.697.000	48.473.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%		5.423.400	4.730.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		34.351.260	28.890.184
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		3.533.513.942	2.177.603.872
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%		50.997.415	104.899.286
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100%		46.660.000	6.210.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100%		24.400.000	31.611.500
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100%			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	100%			1.514.800
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	100%			799.300
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/binetek/sosialisasi Focus Group Discussion dan penerima manfaat dana hibah	100%			

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%			3.441.550
Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%			1.494.300
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100%			
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	100%			
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	100%		49.644.000	187.455.300
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%			
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	100%		2.643.993.000	2.836.329.300
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	100%			

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yg tersusun	100%			
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	100%		540.000	13.639.650
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion	100%		540.000	26.089.350
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%			155.550.300
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%		106.107.900	1.249.300
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%			2.151.050
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI	100%			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%			

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat rencana aksi	100%			14.720.000
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda	100%			943.355.842

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA
TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR	REALISASI TK. KEMAJUAN
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI		
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan PDA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisat Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisat Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	100%	100%
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	100%	100%

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	100%	100%
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%

Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100%	100%
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	100%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	100%	100%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion dan penerima manfaat dana hibah	100%	100%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%	100%
Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%	100%

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100%	100%
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	100%	100%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	100%	100%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	100%
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	100%	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	100%	100%
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yg tersusun	100%	100%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	100%	100%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion	100%	100%

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%	100%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%	100%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	100%	100%
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI	100%	100%
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	100%	100%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat rencana aksi	100%	100%
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda	100%	100%

**ALOKASI SASARAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5
	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan		
	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan		
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	4.952.900	100,00
	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	3.019.950	100,00
	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisat Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	2.659.900	100,00
	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	2.703.700	100,00
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan		
	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	3.596.375.161	100,00
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	3.200.000	100,00
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	3.342.500	100,00
	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan		
	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	15.097.050	100,00
	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan		

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan		
	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan		
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan		
	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	5.227.300	100,00
	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	52.487.450	100,00
	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	26.434.750	100,00
	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	46.277.850	100,00
	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	6.600.000	100,00
	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	73.631.600	100,00
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan		
	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	48.473.700	100,00
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan		
	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	4.730.000	100,00
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	28.890.184	100,00
	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	2.177.603.872	100,00
	Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan		
	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	104.899.286	100,00

	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	6.210.000	100,00
	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	31.611.500	100,00
	PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan		
	Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan		
	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	1.514.800	100,00
	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	799.300	100,00
	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion dan penerima manfaat dana hibah	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan		
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	3.441.550	100,00
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	1.494.300	100,00
	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol		
	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol		
	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	187.455.300	100,00

	PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol		
	1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	2.836.329.300	100,00
	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan		
	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yg tersusun	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan		
	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	13.639.650	100,00
	Jumlah masyarakat / aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	26.089.350	100,00
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	155.550.300	100,00
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	1.249.300	100,00
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	2.151.050	100,00
	PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat		
	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat		
	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat rencana aksi	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	14.720.000	100,00

	Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	943.355.842	100,00
--	---	---	-------------	--------

**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	4.952.900	1 dok	SKPD Bakesbangpol
Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	3.019.950	4 dok	SKPD Bakesbangpol
Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisat Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	2.659.900	4 dok	SKPD Bakesbangpol
Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	2.703.700	4 lap	SKPD Bakesbangpol
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	3.200.000	4 dok	SKPD Bakesbangpol
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	3.342.500	18 dok	SKPD Bakesbangpol
Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%			SKPD Bakesbangpol

Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	15.097.050	6 lap	SKPD Bakesbangpol
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%			SKPD Bakesbangpol
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%			SKPD Bakesbangpol
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	5.227.300	10 jenis	SKPD Bakesbangpol
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	52.487.450	3 jenis	SKPD Bakesbangpol
Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	26.434.750	2 jenis	SKPD Bakesbangpol
Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	46.277.850	2 jenis	SKPD Bakesbangpol
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	6.600.000	5 jenis	SKPD Bakesbangpol
Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	73.631.600	50 kali	SKPD Bakesbangpol
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	48.473.700	1 unit	SKPD Bakesbangpol
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	4.730.000	2 jenis	SKPD Bakesbangpol

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	28.890.184	3 jenis	SKPD Bakesbangpol
Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	2.177.603.872	6 jenis	SKPD Bakesbangpol
Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	104.899.286	17 unit	SKPD Bakesbangpol
Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	6.210.000	1 unit	SKPD Bakesbangpol
Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	31.611.500	40 unit	SKPD Bakesbangpol
PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	1.514.800	1 dok	SKPD Bakesbangpol
Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	799.300	1 dok	SKPD Bakesbangpol
Jumlah masyarakat / aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion dan penerima manfaat dana hibah	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	3.441.550	5 orang	SKPD Bakesbangpol
Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	1.494.300	1 dok	SKPD Bakesbangpol

PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	100%	187.455.300	1 kegiatan	SKPD Bakesbangpol
PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	100%			SKPD Bakesbangpol
1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	100%	2.836.329.300	5 dok	SKPD Bakesbangpol
Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah dokumen penyusunan program kerja yg tersusun	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	13.639.650	2 dok	SKPD Bakesbangpol
Jumlah masyarakat / aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	26.089.350	2 dok	SKPD Bakesbangpol
Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	155.550.300	200 orang	SKPD Bakesbangpol
Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	1.249.300	1 dok	SKPD Bakesbangpol

Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	100%	2.151.050	1 dok	SKPD Bakesbangpol
PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	100%			SKPD Bakesbangpol
Jumlah aparatur yang mengikuti rapat rencana aksi	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	100%	14.720.000	40 orang	SKPD Bakesbangpol
Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	100%	943.355.842	23 orang	SKPD Bakesbangpol

**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG TERPENUHI			
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 dok	4.952.900	
2	Koordinasi dan Penyusunan PDA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA yang disusun	4 dok	3.019.950	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dok	2.659.900	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	2.703.700	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia			
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42 ASN	3.596.375.161	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	4 dok	3.200.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun	18 dok	3.342.500	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia			
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 lap	15.097.050	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia			
9	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia			
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	5.227.300	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	52.487.450	
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 jenis	26.434.750	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	46.277.850	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 jenis	6.600.000	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 kali	73.631.600	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	48.473.700	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis	4.730.000	
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	28.890.184	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 jenis	2.177.603.872	
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 unit	104.899.286	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1 unit	6.210.000	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	40 unit	31.611.500	

		Gedung Kantor dan bangunan lainnya			
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE KEBIJAKAN YANG DITINDAK LANJUTI DALAM KEGIATAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Jumlah dokumen, masyarakat yang mengikuti sosialisasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>			
24	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	1 dok	1.514.800	
25	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	1 dok	799.300	
26	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion dan penerima manfaat dana hibah			
27	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	5 orang	3.441.550	
28	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	1 dok	1.494.300	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN			

		ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>			
29	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	1 kegiatan	187.455.300	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
30	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	1. Jumlah penerima manfaat dana Hibah 2. Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	5 dok	2.836.329.300	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>			
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yg tersusun			

31	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	2 dok	13.639.650	
32	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat /aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi Focus Group Discussion	2 dok	26.089.350	
33	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	200 orang	155.550.300	
34	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	1 dok	1.249.300	
35	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	1 dok	2.151.050	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE KETERCAPIAN PEMANTAUAN DALAM UPAYA KERUSUHAN, KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN DINI			
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>			

36	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat rencana aksi	40 orang	14.720.000	
37	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nara sumber dan panitia Forkopimda	23 orang	943.355.842	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSAN WAJIB**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		FAKTOR PENGGALI	SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		URUSAN INDIKATOR	RUMUSAN OPERASIONAL			
1	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sebanyak 80 LSM dan Ormas yang mendapatkan pembinaan dan terdaftar di Bakesbangpol	80	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
			2			

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN**

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003

**TABEL KEBUTUHAN DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
TA 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN ESLON III	PROGRAM	INDIKATOR ESELON IV	BIDANG	NILAI SASARAN			TARGET %		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6						
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap politik dan hukum	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Forum pembauran Bangsa	Integrasi Bangsa	99,9	100,0	100	100	100	100
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Sosialisasi P4GN		-	-	100	-	-	100
		persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Fasilitasi bantuan keuangan parpol	Hubungan Antar Lembaga	63,0	99,0	100	100	100	100
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		-	85,0	100	-	100	100

		persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Koordinasi rencana aksi penanggulangan gangguan dalam daerah	Kajian Strategis	90,5	92,0	100	100	92	92
--	--	---	--	--	------------------	------	------	-----	-----	----	----

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era Otonomi Daerah telah berjalan sejalan dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik(Good Governance) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktifitasnya.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdayaguna, bersih dan tanggung jawab perlu suatu media pertanggung jawaban yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah disadari pemerintah sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera di upayakan beberapa langkah strategis dan tindakan – tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (GoodGovernance) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu dibuat Rencana Kinerja yang memuat rencana kinerja dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikenal dengan (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki wewenang lebih luas didalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pusat dan Propinsi UU No. 32 / 2004 ini meliputi : demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip – prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi di orientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya local. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil dari kegiatan pembangunan yang di lakukan secara berkesinambungan. Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bangkalan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang persial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bangkalan dibutuhkan suatu pendekatan sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek – aspek yang fundamental dan strategis. Dengan demikian diharapkan keseluruhan elemen masyarakat Kota Bangkalan akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bangkalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang

pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumberdaya tersebut bersifat spesifik local yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber – sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini ,kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bangkalan kearah yang di inginkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut kemudian wajib dikomunikasikan keseluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen tersebut untuk memajukan kegiatan pembangunan di Bidang Politik di Kota Bangkalan. Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang di dukung oleh tegaknya penegakan hukum(Law Enforcement) dan di terapkannya prinsip – prinsip Good Governance di lingkungan masyarakat di Kota Bangkalan.

Proses penyusunan LAKIP memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan LAKIP diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan LAKIP yang telah di buat fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah di tetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ini adalah untuk menyediakan acuan,

arahan kebijakan dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan daerah yang isi dan substansinya mencakup indikasi program dan kegiatan yang sudah dilakukan, sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan ini maka LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 2.1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- 2.2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 2.3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
- 2.4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- 2.5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.

C. LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan;
7. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

D. GAMBARAN UMUM SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bangkalan yang merupakan unsur penunjang organisasi perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 4 Tahun 2008 memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Bidang Kajian Strategis
5. Bidang Integrasi Bangsa
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2008, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas yaitu : **"Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik"**.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik
4. Pengelolaan ketatausahaan dilingkungan Badan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. ORGANISASI

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (SDM Aparatur) pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada tabel :

TABEL 1
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

NO	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Golongan I	0 Orang	
2	Golongan II	13 Orang	
3	Golongan III	23 Orang	
4	Golongan IV	5 Orang	
Jumlah		41 Orang	

Sumber : Sub Bagian Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Desember 2022

Sedangkan jumlah potensi sumber daya aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan bila ditinjau dari segi tingkat pendidikan pada tabel 2 dibawah ini :

TABEL 2
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekolah Dasar	- Orang	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1 Orang	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	14 Orang	
4	Sarjana Muda	1 Orang	

5	Sarjana	18 Orang	
6	Pasca Sarjana	7 Orang	
Jumlah		41 Orang	

Sumber : Sub Bagian Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Desember 2021

Sedangkan jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini :

TABEL 3
JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN DAN STAF
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II.a	- Orang	
2	Eselon II.b	1 Orang	
3	Eselon III.a	1 Orang	
4	Eselon III.b	3 Orang	
5	Eselon VI.a	9 Orang	
6	Staf	27 Orang	
Jumlah		41 Orang	

Sumber : Sub Bagian Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Desember 2021

Dengan dukungan sumber daya aparatur (SDM) yang dimiliki tersebut, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan selaku pembantu utama kegiatan Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Kata pengantar

Daftar isi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Gambaran Umum SKPD
- E. Organisasi
- F. Sistematika Penyusunan LAKIP

BAB II : PENYAJIAN KINERJA

- A. RPJM (Rencana Program Jangka Menengah)
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2022
- C. Standart Penilaian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Capaian Sasaran
- B. Penjelasan Pencapaian Sasaran

BAB IV : REALISASI ANGGARAN

- A. Target Belanja Langsung
- B. Realisasi Belanja Langsung

BAB V : PENUTUP

Lampiran – Lampiran :

- 1. Rencana Strategis
- 2. IKU (Indikator Kinerja Utama)
- 3. Penetapan Kinerja 2022
- 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2022
- 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
- 6. PengukuranCapaian Sasaran (PPS) Tahun 2022
- 7. Program dan kegiatan Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

RPJM (Rencana Program Jangka menengah) merupakan penjabaran dari RPJP (Rancana Program Jangka Panjang) Daerah dimana di dalam penyusunan RPJM dimaksud selanjutnya diaktualisasikan dalam bentuk Renstra, penjabaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagai berikut ;

1. VISI

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan adalah mewujudkan Masyarakat yang Demokratis, Agamis, Dan Berbudaya. Pada hakekatnya peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan sangat strategis mengingat pada tahun 2022 diselenggarakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang diharapkan situasi dan kondisi yang aman dan terkendali.

Mengingat pentingnya peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan kiranya perlu diberikan Pendidikan Politik kepada masyarakat sipil guna meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan yang berasaskan Pancasila.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan telah menetapkan visi yang mengemban makna dan hakekat yang sama sebagaimana diuraikan diatas, visi ini bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan aspek perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang lebih mensejajarkan kedudukan masyarakat dengan kedudukan pemerintah dalam suatu proses (rangkaian kegiatan) Wawasan ini mengandung substansi bahwa masyarakat tidak hanya didudukkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi juga sebagai subyek pembangunan, sehingga kedua unsur dimaksud sama-sama mengemban faktor determinan, bukan pengemban faktor kontributif.

Oleh karena itu guna menunjang dan mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan telah menetapkan visinya yakni :

" MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS, AGAMIS, DAN BERBUDAYA ". Keberadaan visi ini merupakan perwujudan kepedulian kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Politik Kabupaten Bangkalan yang searah dengan misi yang diembannya.

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan setiap organisasi harus mempunyai Misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih.

Misi bagi organisasi, pada hakekatnya merupakan pernyataan (*statement*) yang menjawab pertanyaan (*question*) "mengapa organisasi itu ada". Misi diletakkan sebagai suatu gambaran yang mampu mengkomunikasikan visi pada suatu organisasi, mencerminkan karakter organisasi, serta mengandung nilai-nilai organisasi, sehingga mampu memberikan petunjuk sebagai pemandu dalam mencapai tujuan organisasi yang dikehendaki.

Eksistensi misi dalam suatu organisasi biasanya lebih bersifat konkrit dibandingkan dengan eksistensi visi, oleh sebab itu tingkat spesifikasi yang terkandung di dalam pernyataan sebuah misi relatif lebih nampak jika dibandingkan dengan visi dalam suatu organisasi. Misi

biasanya menawarkan keunggulan yang menunjukkan upaya peningkatan efisiensi, menawarkan inovasi serta meningkatkan gairah kerja.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan mempunyai misi antara lain:

1. Meminimalisir konflik di tengah-tengah masyarakat
2. Meningkatkan semangat Nasionalisme dan rasa cinta nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Berpolitik

3. TUJUAN

Dalam rangka mencapai misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan ditetapkan :

1. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang damai, aman dan sejahtera
2. Mewujudkan semangat masyarakat akan rasa Nasionalisme dan rasa akan cinta terhadap Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat terhadap politik untuk ikut aktif di dalamnya, sehingga tingkat persentase keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik dari tahun ke tahun terus meningkat.

4. SASARAN

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan ditetapkan sasaran :

1. Masyarakat untuk selalu memelihara dan menciptakan lingkungan masyarakat yang damai, aman dan sejahtera.

2. Masyarakat agar selalu ditanamkan rasa rasionalisme dan rasa cinta terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa.
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan politik

5. Indikator Kinerja Utama

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, yang terdiri dari sekretariat serta beberapa bidang yang saling berinteraksi dan bersinergi dengan demikian organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak akan terlepas dari lingkungannya yang mengakibatkan berpengaruh terhadap perkembangan / pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melalui kinerja aparatur diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan public secara umum.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada puncak sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berisikan tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh adanya evaluasi indikator-indikator kinerja yang ditunjukkan melalui pengukuran dan penilaian kinerja.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan telah dapat melaksanakan tugas pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dengan bukti mengenai keberhasilan tersebut dapat dilihat pada capaian hasil kerja setiap sasaran.

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran pencapaian kinerja harus didasarkan kepada dokumen-dokumen yang telah disepakati dan ditetapkan, yaitu Rencana Strategis dan Rencana Kinerja (Tahunan), serta Data dan Informasi mengenai realisasi kinerja.

Tujuan yang tidak realistis, sasaran yang sulit diukur, data / informasi yang tidak lengkap dan laporan yang tidak sesuai, merupakan penghambat dalam melakukan pengukuran pencapaian kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat diukur melalui PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang terdapat dalam lampiran.

Untuk mempermudah interpretasi prestasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

- ✓ 85 s/d 100 % = sangat berhasil
- ✓ 70 s/d 79 % = berhasil
- ✓ 55 s/d 69 % = cukup berhasil
- ✓ 0 s/d 54 % = tidak berhasil.

B. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat dikatakan berhasil atau sesuai rencana, ini dapat dilihat dari Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dimana di dalam PPS rata-rata pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021 rata-rata persentase 93.67%, sedangkan persentase Tahun Anggaran 2022 rata-rata persentase 96%, maka terjadi kenaikan persentase 3%.

Dilihat dari persentase tersebut, kalau kita melihat kepada indikator penilaian (range penilaian) yang terdapat diatas, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan masih berada di range **SANGAT BERHASIL**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 merupakan wujud dari tindak lanjut Inpres No. 7 tahun 1999 sekaligus sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan beberpa paparan yang tersaji dalam laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan untuk Tahun Anggaran 2022 ***berhasil*** dikarenakan didukung oleh faktor-faktor antara lain :

1. Memanfaatkan anggaran secara maksimal di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
3. Tersedianya sarana dan prasarana peralatan lain yang diperlukan di dalam mendukung tugas;
4. Adanya sistem informasi dan ketersediannya data yang akurat dan valid sebagai bahan untuk menganalisa dalam merumuskan program dan petunjuk teknis;
5. Adanya Sistem dan prosedur kerja yang baku dan dipedomi secara konsisten oleh semua pihak yang ada dalam organisasi;
6. Adanya sistem monitoring dan evaluasi serta pengendalian atas pelaksanaan tugas;

7. Adanya komitmen yang kuat dan kondusif guna menunjang hubungan antar bagian-bagian dan antara bagian dengan unit kerja lain.
8. Adanya dukungan dari beberapa jasa pihak ketiga.

Dengan tersusunnya LAKIP ini kami sangat mengharapkan masukan dan saran sebagai umpan balik demi perbaikan kinerja pada waktu mendatang ke arah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat di dalam meningkatkan kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan demi mewujudkan VISI dan MISI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan pada khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN**

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003